

INTEGRASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DALAM MENINGKATKAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

MIKAIL MEGA MAULANA, SUWADI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 23204091004@student.uin-suka.ac.id. suwadi@uin-suka.ac.id

(Article History)

Received June 30, 2024; Revised December 24, 2024; Accepted December 26, 2024

Abstract: Integration of Internal Quality Assurance System in Improving Quality Standards for Education Management in Schools

This research aims to describe education management standards based on National Education Standards (SNP) and explore the urgency of integrating the Internal Quality Assurance System (SPMI) in education management in schools and madrasas to achieve higher education management quality standards. The method used is a literature study with a qualitative approach, collecting data from relevant literature such as books and journal articles. The research results show that quality standards for education management include aspects of planning, implementation, supervision and evaluation. The implementation of SPMI has proven effective in helping schools and madrasas identify weaknesses in management and take appropriate corrective steps. The SPMI process includes mapping educational quality, determining quality improvement plans, implementing plans, monitoring and evaluating, and establishing new quality standards. By implementing SPMI, schools and madrasas can consistently improve the quality of education, support the achievement of SNP, and build a culture of sustainable quality. This research emphasizes the need for understanding and commitment from all components in schools and madrasas in implementing SPMI to achieve quality education management. This research is limited to a literature study, so it is hoped that future research can use more diverse data collection methods and techniques to expand the analysis from different perspectives.

Keywords: *Internal Quality Assurance System, Quality Standards for Education Management, National Standards for Education, Schools*

Abstrak: Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar pengelolaan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mengeksplorasi urgensi pengintegrasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dan madrasah untuk mencapai standar mutu pengelolaan pendidikan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari literatur relevan seperti buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar mutu pengelolaan pendidikan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Implementasi SPMI terbukti efektif dalam membantu sekolah dan madrasah

mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Proses SPMI mencakup pemetaan mutu pendidikan, penentuan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar mutu baru. Dengan penerapan SPMI, sekolah dan madrasah dapat secara konsisten meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung pencapaian SNP, dan membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan perlunya pemahaman dan komitmen dari semua komponen di sekolah dan madrasah dalam mengimplementasikan SPMI untuk mencapai pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini terbatas pada studi pustaka, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang lebih beragam untuk memperluas analisis dari perspektif yang berbeda.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Sekolah

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah memiliki peranan krusial dalam memastikan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya dalam memastikan progres pertumbuhan aspek mutu standar pengelolaan pendidikan yang berkelanjutan. Sekolah yang bermutu dapat tercermin dari standarisasi mutu yang diterapkan dalam pengelolaan sekolah tersebut (Arifianto & Abdullah, 2022; Mardhiyah et al., 2023). Sekolah dengan pengelolaan yang baik akan mengantarkan pendidikan yang berkualitas, sedangkan sekolah dengan pengelolaan yang buruk akan menimbulkan ritme budaya organisasi yang tidak teratur dan berpotensi mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pemenuhan SNP (Fachrudin, 2021; Sari, 2024). Pemenuhan SNP sangat penting bagi seluruh satuan pendidikan, mengingat SNP merupakan tolak ukur utama dalam menyeragamkan standar minimal kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga peserta didik di seluruh daerah di Indonesia mendapat kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan bermutu (Badrudin et al., 2024). Dengan demikian, penjaminan mutu adalah komponen integral yang menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan mencapai dengan standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampauinya serta memberikan manfaat yang maksimal. Maka dari itu, usaha meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan menjadi suatu hal yang krusial dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas serta relevan dengan perkembangan zaman.

Saat ini masih banyak satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah yang menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan sesuai dengan SNP. Studi terdahulu di salah satu provinsi di Indonesia menemukan bahwa secara umum para *stakeholder* satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah yang dalam hal ini melibatkan guru, kepala satuan

pendidikan, dan komite memiliki pemahaman dengan tingkat yang bervariasi antara tingkat pemahaman yang masih kurang hingga cukup terhadap standar pengelolaan pendidikan (Arsyad *et al.*, 2021; Palettei *et al.*, 2021). Tidak hanya dari segi kurangnya pemahaman saja, dalam temuan (Ibrahim *et al.*, 2022) disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai di banyak sekolah dan madrasah juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan pendidikan. Dalam menghadapi tantangan ini, integrasi SPMI dalam pengelolaan pendidikan di sekolah menjadi semakin penting.

SPMI sendiri merupakan serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pengelolaan sekolah secara mandiri dan berkelanjutan (Safrijal, 2023). Dalam praktiknya, sekolah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan mereka melalui evaluasi diri dan menentukan strategi dan perencanaan yang tepat untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus ke arah yang lebih baik (Khotimah *et al.*, 2023). SPMI di sekolah dasar dan menengah sejatinya telah diatur sejak tahun 2016 melalui Permendiknas No. 28 Tahun 2016, tapi pada realitanya hingga kini masih terdapat sekolah serta madrasah yang belum menerapkan SPMI (Pemelanintyas, 2019). Oleh karena itu, implementasi SPMI yang efektif semestinya dapat menjadi solusi bagi sekolah dan madrasah untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan pendidikan.

Penulis melakukan kajian pustaka terhadap beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini. Di antaranya, penelitian Subakri (2020) menemukan bahwa peningkatan standar mutu pengelolaan pendidikan berbasis filsafat pendidikan Islam adalah dengan mengutamakan *itqan* dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, berorientasi pada tujuan dan konsep manajemen. Darmaji *et al.*, (2020) mendeskripsikan bahwa langkah-langkah SPMI di sekolah yang diteliti dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengikuti langkah-langkah *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), melalui tahapan-tahapan tersebut sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan, dibuktikan dengan diraihnya berbagai prestasi nasional dan internasional. Selanjutnya, Arifin *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa penjaminan mutu di madrasah yang diteliti adalah dengan menggunakan SNP sebagai acuan yang diselaraskan dengan visi, misi, serta kondisi reaita madrasah, kemudian hasil penyelarasan tersebut disampaikan kepada seluruh pihak yang ada di madrasah. Pemetaan pengelolaan SPMI dilakukan melalui evaluasi diri dari seluruh komponen madrasah, serta penyusunan RKM dan RKTm sebagai panduan untuk pengelolaan, penerapan, pengawasan, dan evaluasi program secara sistematis dan terukur. Hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut mungkin telah mengidentifikasi manfaat SPMI dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum, tetapi mungkin belum secara khusus menggali urgensi pengintegrasinya

dalam konteks usaha meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan yang menjadi salah satu patokan penting dalam SNP.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana standar mutu pengelolaan pendidikan yang berlaku dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan menganalisis bagaimana urgensi pengintegrasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan. Melalui analisis mendalam terhadap kedua aspek tersebut, diharapkan studi dalam penelitian ini mampu memberi kontribusi baik secara teoretis ataupun praktis kepada sekolah dan madrasah dalam mengimplementasikan SPMI dengan lebih efektif. Dengan begitu, setiap satuan pendidikan mampu meraih tingkat mutu pengelolaan pendidikan yang tidak hanya sekedar memenuhi SNP, tetapi juga melampauinya.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan (*library research*) dengan penggunaan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan menggunakan cara mempelajari dan memahami teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan SPMI serta standar mutu pengelolaan pendidikan dalam SNP. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya menyiapkan alat yang diperlukan, membuat bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari literatur yang bersumber dari buku dan artikel jurnal yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Untuk memastikan kualitas sumber literatur, peneliti menggunakan basis data terkemuka, di antaranya Google Scholar, Garuda, Sinta, dan DOAJ. Kriteria seleksi sumber literatur meliputi: (1) Relevansi, sumber yang dipilih harus secara langsung berkaitan dengan SPMI dan SNP; dan (2) Tahun terbit, sumber yang dipilih harus *up to date* dengan maksimal sepuluh tahun untuk sumber buku dan dokumen regulasi pemerintah, serta maksimal 5 tahun untuk sumber artikel jurnal. Analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk menghasilkan penarikan makna yang akurat dan mengkaji ulang secara kontekstual. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, dan mengelompokkan berbagai konsep hingga ditemukan data yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan

Standar mutu pengelolaan pendidikan merupakan salah satu komponen di antara delapan komponen SNP. Standar pengelolaan pendidikan bersinggungan

langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan (Subakri, 2020; Warisno, 2021).

Standar pengelolaan pendidikan yang terbaru saat ini tertuang dalam regulasi Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Regulasi ini ditetapkan sebagai panduan bagi setiap satuan pendidikan dalam mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pengembangan potensi, kreativitas, kemampuan, serta kemandirian peserta didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023). Secara umum peraturan ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pemikiran berkelanjutan yang melibatkan analisis, perumusan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil perlu memiliki keselarasan internal yang secara sistematis berkaitan dengan keputusan-keputusan yang lain, baik dalam bidang yang sama maupun dengan bidang lain (Warisno, 2021). Perencanaan pendidikan dapat dimulai dengan merumuskan visi dan misi sekolah, menetapkan tujuan sekolah, menyusun rencana kerja yang mencakup kesiswaan, kegiatan pembelajaran, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan beserta pengembangannya, keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan, dan budaya sekolah (Subakri, 2020). Adapun dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023, perencanaan pendidikan hendaknya paling tidak memuat bidang penganggaran, kurikulum dan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dalam pendidikan adalah langkah tindakan untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia pada satuan pendidikan, dengan tujuan untuk meraih sasaran dan tujuan yang telah disusun dalam perencanaan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023). Pelaksanaan rencana kerja dan program pendidikan mencakup beberapa tahapan, dimulai dari menyusun pedoman sekolah atau madrasah yang mencakup kalender pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tata tertib, struktur organisasi, kode etik, serta rincian dana anggaran operasional. Tahapan berikutnya adalah menyusun struktur organisasi sekolah, meliputi penugasan staf administrasi dengan tanggung jawab dan kewenangan yang konkret dalam rangka menunjang pengelolaan administrasi secara optimal. Struktur organisasi ini ditinjau secara berkesinambungan untuk menilai keefektifan proses operasional sekolah. Keputusan terkait diambil oleh kepala satuan pendidikan dengan menimbang masukan dari komite sekolah atau madrasah (Subakri, 2020). Pelaksanaan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan terdiri dari delapan sektor, yaitu kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan,

sarana prasarana, peran hubungan masyarakat dan kemitraan, lingkungan dan budaya, keuangan dan pembiayaan, dan sektor lainnya yang berperan dalam peningkatan mutu (Warisno, 2021).

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi di satuan pendidikan terwujud dalam lima komponen inti, yakni perencanaan program pengawasan, evaluasi diri internal sekolah, peninjauan dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan akreditasi, serta evaluasi pemanfaatan pendidik dan tenaga kependidikan (Warisno, 2021). Dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pengawasan pendidikan merupakan suatu siklus yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Supervisi memberi dukungan dan bimbingan kepada pendidik dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, hasil dari pemantauan dan supervisi dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan perlu rencana tindak lanjut.

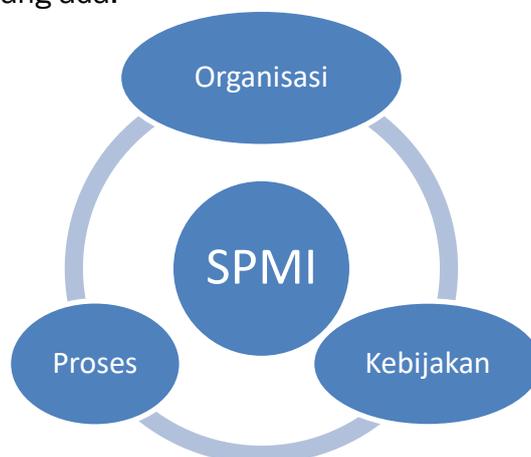
Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Analisis Pengintegrasinya dalam Meningkatkan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan

Pada dasarnya penjaminan mutu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan sistem yang diimplementasikan oleh sekolah atau madrasah secara mandiri dengan menyertakan semua pihak internal yang terkait. Di sisi lain, SPME merupakan proses penjaminan standar mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal yang diinisiasi, dibentuk, serta diakui oleh pemerintah sebagai badan yang mengevaluasi mutu untuk lembaga pendidikan. Dalam konteks ini pelaksana SPME untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) yang sekarang telah bertransformasi dan berganti nama menjadi BAN-PDM.

SPMI merupakan sistem yang terintegrasi dari beberapa unsur, di antaranya organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait yang dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah untuk memastikan kualitas pendidikan yang memenuhi atau bahkan melampaui standar mutu yang diatur dalam regulasi nasional (Ula & Bakar, 2021). Fungsi dan tujuan SPMI dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 Ayat 2 yang pada intinya adalah sistem penjaminan mutu pendidikan bertujuan agar semua sekolah dapat menjaga kualitas pendidikannya secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan standar yang ditetapkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016). Gambaran unsur-unsur dalam sistem penjaminan mutu yang tertuang dalam Gambar 1.

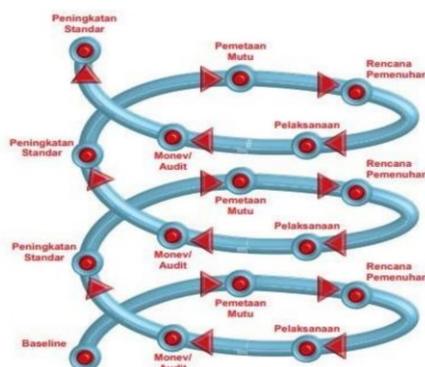
SPMI dapat berfungsi dengan baik di sekolah dan madrasah jika ada elemen penjaminan mutu dalam pengelolaannya. Elemen ini dapat berupa tim penjaminan mutu independen khusus yang setidaknya terdiri dari manajemen kurikulum

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan kesiswaan. Penambahan dari elemen lain dapat berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan dari satuan pendidikan tersebut. Apabila sumber daya tidak mencukupi, tanggung jawab tim penjaminan mutu ini dapat dialihkan kepada pihak manajemen sekolah yang ada.



Gambar 1. Unsur-Unsur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Terdapat lima tahap dalam siklus implementasi SPMI yang perlu dilakukan dengan baik, yaitu dimulai dari pemetaan mutu sekolah yang mengacu pada SNP, selanjutnya melakukan perencanaan peningkatan mutu sekolah yang terstruktur dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), dilanjutkan dengan implementasi dari program penjaminan mutu yang telah direncanakan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu. Terakhir, hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan strategi dan menetapkan standar mutu bar yang lebih tinggi secara berkelanjutan (Ridwan & Yuliana, 2024). Kelima tahapan dalam siklus penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan di Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal Berkelanjutan

1. Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu ini dilakukan melalui program evaluasi internal di sekolah/madrasah, yang dikenal sebagai Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau Evaluasi

Diri Madrasah (EDM). Tahap-tahap yang ada pada proses evaluasi diri tersebut adalah: (a) Membuat instrumen evaluasi; (b) Menghimpun data evaluasi yang dibutuhkan; (c) Mengolah dan menganalisis data yang telah dihimpun; (d) Menyusun peta mutu; (e) Menggambarkan sejauh mana ketercapaian mutu berdasarkan kriteria SNP. (f) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pencapaian mutu; dan (g) Menghasilkan solusi dan rekomendasi perbaikan untuk permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Penentuan Rencana Peningkatan Mutu

Dalam menetapkan rencana peningkatan kualitas pendidikan, hal utama yang perlu diterapkan yakni penggunaan peta mutu yang telah dibuat sebelumnya sebagai indikator utama. Selain itu, perlu didukung oleh dokumen lain seperti regulasi yang berlaku mengenai standar kurikulum, pengelolaan satuan pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui berbagai inovasi terbaru.

3. Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu

Untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, diperlukan pedoman manajemen pendidikan dengan semua prinsip dan langkah-langkahnya. Fungsi utama dalam manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam prinsip manajemen pendidikan, fungsi perencanaan mencakup tiga fungsi utama sekaligus, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Fungsi perencanaan ini diawali dengan menyusun program tahunan yang dirangkum dalam rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan yang disusun berdasarkan pertimbangan sumber daya dan potensi yang terdapat di sekolah atau madrasah.

4. Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Rencana Peningkatan Mutu

Pengawasan/monitoring merupakan serangkaian proses mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan suatu program dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan dalam pelaksanaannya. Monitoring mencakup identifikasi permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi solusi terkait masalah tersebut. Di sisi lain, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa dan menilai tingkat ketercapaian suatu program yang telah dilaksanakan, serta mengukur efektivitas pelaksanaannya. Pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwasanya pelaksanaan upaya pemenuhan mutu berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menghasilkan hasil akhir berupa laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan laporan implementasi rencana peningkatan mutu yang disertai dengan rekomendasi tindakan perbaikan apa saja yang diperlukan. Dengan demikian, peningkatan mutu yang berkelanjutan dapat dijamin untuk terus dilakukan.

5. Penetapan Standar Mutu Baru dan Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu

Sesudah monitoring dan evaluasi standar mutu dilakukan, akan teridentifikasi apakah kriteria standar mutu yang baru mencapai tingkat yang lebih tinggi

dibanding dengan kriteria standar awal sebelumnya atau justru lebih rendah. Oleh karena itu, satuan pendidikan hendaknya menyusun strategi untuk peningkatan mutu yang selanjutnya. Penyusunan strategi ini bertujuan untuk membantu satuan pendidikan mencapai SNP hingga melampauinya. Melalui pengimplementasian seluruh tahapan dalam siklus SPMI secara independen dan berkelanjutan, dapat proyeksikan akan terbentuk budaya mutu di sekolah atau madrasah. Budaya mutu tersebut akan memacu sekolah atau madrasah untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan begitu, mutu pendidikan akan terus meningkat dari masa ke masa secara konsisten.

SPMI memberikan konsep dasar yang menggarisbawahi pentingnya peran internal setiap satuan pendidikan dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara mandiri dengan dukungan dari setiap elemen yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Penerapan SPMI bertujuan untuk menjamin bahwa SNP dapat terpenuhi dan terlampaui, serta mendorong terbentuknya budaya mutu yang terus meningkat secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, sekolah atau madrasah yang akan mengimplementasikan SPMI dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan hendaknya membentuk organisasi dalam bentuk tim penjamin mutu yang benar-benar memahami sistem penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan, karena berdasarkan temuan dari Arsyad *et al.*, (2021) pemahaman terhadap SNP yang kurang menyebabkan tidak maksimalnya peningkatan mutu di lembaga pendidikan.

Melalui tahapan pemetaan mutu pendidikan, sekolah atau madrasah dapat melakukan evaluasi diri secara internal. Ini membantu sekolah atau madrasah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan pendidikan, termasuk aspek-aspek seperti kurikulum, sarana prasarana, dan manajemen tenaga kependidikan. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Hasil dari pemetaan mutu tersebut menjadi landasan dalam merumuskan perencanaan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Mereka dapat menetapkan prioritas dalam pengembangan perencanaan kegiatan pendidikan. Berdasarkan rencana tersebut, mereka dapat melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara sistemis dengan memperhatikan aspek pengorganisasian sumber daya, pengarahannya, dan pengawasan pelaksanaan.

Kemudian dalam tahap monitoring dan evaluasi sekolah dapat melakukan pengukuran kemajuan dalam implementasi rencana peningkatan mutu pengelolaan pendidikan serta rencana kegiatan pendidikan. Kemudian hasil dari monitoring dan evaluasi ini menjadi landasan bagi sekolah untuk menetapkan strategi meningkatkan standar mutu baru yang lebih tinggi. Dengan demikian, implementasi SPMI dalam meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan menunjukkan bahwa SPMI memberikan kerangka kerja yang kokoh dan terstruktur bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat memastikan bahwa

pengelolaan pendidikan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Arifin *et al.*, (2023) dan Darmaji *et al.*, (2020) menekankan pentingnya langkah-langkah sistematis dalam SPMI, seperti model PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mereka menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini berkontribusi pada pencapaian prestasi sekolah. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPMI melibatkan pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan temuan kajian pustaka yang menyatakan bahwa evaluasi diri merupakan bagian integral dari proses penjaminan mutu, membantu lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pengintegrasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan sekolah sangat penting untuk meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan. Melalui langkah-langkah sistematis seperti pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan, SPMI memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai. Pemetaan mutu sebagai langkah awal membantu sekolah memahami kondisi mereka dan menetapkan rencana peningkatan yang terarah. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi memastikan bahwa program yang diimplementasikan berjalan efektif dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pengintegrasian SPMI tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga membangun budaya mutu yang mendorong semua pihak di lembaga pendidikan untuk berkomitmen terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

PENUTUP/SIMPULAN

Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan satuan pendidikan sekolah/madrasah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan. Melalui konsep dasar SPMI, sekolah diberdayakan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu secara mandiri dengan dukungan dari unsur-unsur yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Tahapan pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan penetapan standar mutu baru memberikan kerangka kerja yang terstruktur bagi satuan pendidikan untuk menjamin bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, implementasi SPMI pada sekolah atau pun madrasah membuka peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan yang berkesinambungan. Dengan demikian, sekolah dan madrasah dapat terus berperan aktif dalam mendukung pemenuhan SNP serta pembentukan budaya mutu yang lebih baik. Penelitian ini mungkin masih memiliki keterbatasan, penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan keterbatasan belum

menyelidiki integrasi SPMI di sekolah secara aktual, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya dapat menerapkan metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang lebih beragam untuk memperdalam analisis dari perspektif yang berbeda terhadap dampak implementasi SPMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. N., & Abdullah, D. (2022). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(2), 98–105. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i2.602>.
- Arifin, M., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademik (SPMIA) untuk Meningkatkan Mutu Lulusan pada MTsN Lamandau. *JPGI: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 8(1), 1–7. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>.
- Arsyad, Sulfemi, W. B., & Munthoi, A. (2021). Pemahaman dan Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *IQ (Ilmu Al Quran) Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 259–278. <http://dx.doi.org/10.37542/iq.v4i02.239>.
- Badrudin, Setiana, R., Fauziyah, S., & Ramadani, S. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1797–1808. <http://dx.doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3962>.
- Darmaji, Supriyanto, A., Adha, M. A., & Timan, A. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/10.29407/jpdpn.v5i2.13190>.
- Fachrudin, Y. (2021). Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berbasis Pesantren. *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 91–108. <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.
- Ibrahim, Prasetyo, A., Niswah, C., & Zulkipli. (2022). Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 170–181. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i3.578>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan Menengah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan*

Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

- Khotimah, U. H., Juanda, A., & Rosidin, D. N. (2023). Implementasi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Cirebon. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 2(2), 285–295. <https://doi.org/10.56855/intel.v2i2.376>
- Mardhiyah, Saputra, A., Fahrezi, D. W., Hasri, S., & Sohiron. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar. *Jurnal Sustainable*, 6(2), 698–705. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i2.4036>.
- Palettei, A. D., Yusfitriadi, & Sulfemi, W. B. (2021). Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah Terhadap Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 38–53. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1592>.
- Pemelanintyas, R. (2019). Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 230–237. <https://doi.org/10.21831/sakp.v8i3.15864>.
- Ridwan, M., & Yuliana, C. D. (2024). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 3746–3756. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.12949>.
- Safrijal. (2023). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Economica Didactica*, 4(2), 25–28. <https://doi.org/10.17529/jed.v4i2.35360>.
- Sari, J. (2024). Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah. *JEKObI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 87–94. <https://jekobi.iam-indonesia.org/index.php/jekobi/article/view/87-94>.
- Subakri. (2020). Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 99–120. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/194>.
- Ula, H., & Bakar, M. Y. A. (2021). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(2), 192–203. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v7i2.2623>.
- Warisno, A. (2021). Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *An-Nida*, 1(1), 1–8. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/jp1>.